

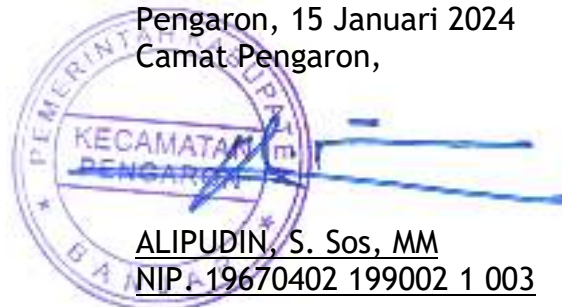
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pengaron Tahun 2023 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

LKjIP Kecamatan Pengaron ini adalah merupakan dokumen pertanggung jawaban Kecamatan Pengaron dalam menjalankan kegiatan - kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi dan Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok yang diemban. Sebagai salah unsur dari fungsi pembangunan sosial dan ekonomi.

Kecamatan Pengaron telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Pengaron sendiri untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya Laporan ini juga menjadi masukan penilaian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

Pengaron, 15 Januari 2024
Camat Pengaron,



ALIPUDIN, S. Sos, MM
NIP. 19670402 199002 1 003

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	vi
A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN	vi
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI	vi
B.1 KEDUDUKAN :	vi
B.2 TUGAS :	vii
B.3 FUNGSI :	vii
C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	viii
D. ISU STRATEGIS	ix
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	x
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	xi
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA	xi
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	12
A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN LALU	12
A.2 PERBANDINGAN REALISASI DENGAN CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA	19
A.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA	34
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN	35
C. REALISASI ANGGARAN	39
C.1 ANALISA EFISIENSI	44
D. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2020	50
D.1. EVALUASI KINERJA TAHUN 2020	50
D.2. TINDAK LANJUT	50
BAB IV PENUTUP	51
A. KESIMPULAN	51
b. SARAN-SARAN	52

LAMPIRAN 52

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Perangkat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja (*Perangkat daerah*).

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra (*Perangkat daerah*) Banjar 2021 - 2026 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbang Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2023 telah berhasil dicapai.

Analisa terhadap 1 sasaran strategis Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian pada 1 sasaran strategis masuk pada kategori sangat baik dengan nilai rata - rata 83,51%.

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, sumber daya manusia perencana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk

meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banjar, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Bappelitbang Kabupaten Banjar ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Banjar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Kecamatan Pengaron berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjar dan rincian anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Pengaron adalah seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Sumber Dana	Besar Anggaran (Rp)	Persentase (%)
APBD	Rp 2.456.442.906	100 %

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Kecamatan Pengaron
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Kecamatan Pengaron
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Kecamatan Pengaron kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Kecamatan Pengaron
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Pengaron

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pengaron Kab. Banjar Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri / Permen KL terkait dengan Tugas dan

Fungsi Perangkat Daerah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 3).
8. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B.1 KEDUDUKAN :

Kecamatan Pengaron merupakan unsur Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B.2 TUGAS :

Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 04 Juni 2014 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

B.3 FUNGSI :

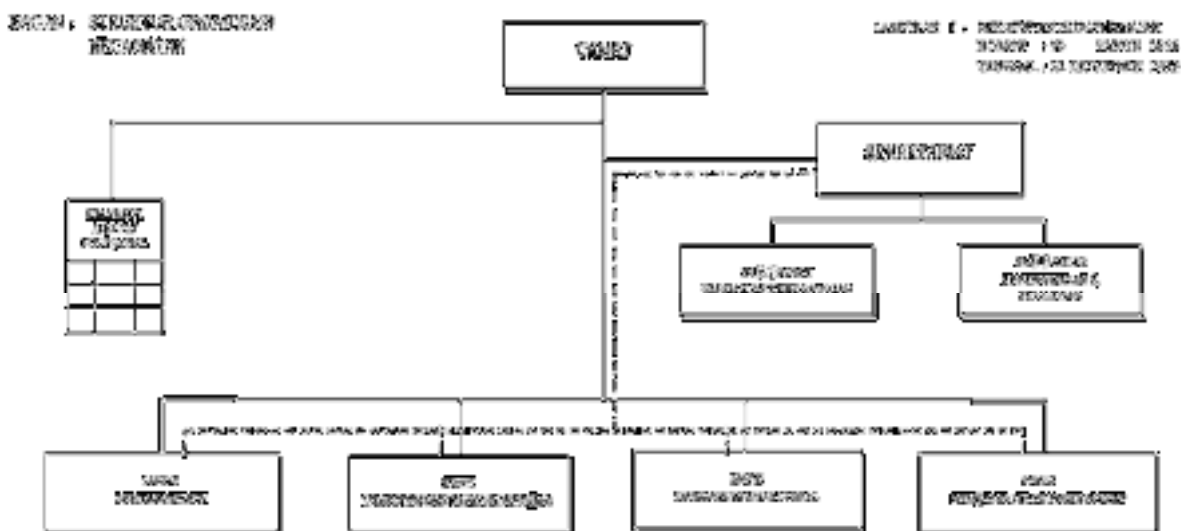
Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas. Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, Administrasi Kependudukan dan Pembinaan Keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan;

- g. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan.

Susunan organisasi Kecamatan Pengaron terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan aset
- c. Kepala Seksi Pemerintahan
- d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Kelompok Fungsional



Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan Pengaron

C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Pengaron

yang membantu Kepala Daerah dalam Urusan Pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (Renstra Perubahan dan Renja) yaitu melalui proses analisis pohon masalah sehingga diperoleh mapping matriks masalah pokok, masalah dan akar masalah, dan hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Kecamatan Pengaron masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

Tabel I

Tabel Permasalahan pada Kecamatan Pengaron

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya Kualitas Pelayanan Publik	Masih Belum Optimalnya PATEN	Masih Rendahnya Penyelenggaraan Perizinan dan Akuntabilitas Kecamatan

D. ISU STRATEGIS

Kecamatan Pengaron secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Kecamatan Pengaron sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok Pelayanan, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan Pemerintahan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam Pemerintahan.

Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya diltampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah sebagaimana tersebut di atas (Bab I.C). Isu srategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (Unresolved Matters) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada Permendagri 86 Tahun 2017, kesepakatan melalui FGD atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja.

Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Kecamatan Pengaron adalah Pelaksanaan Pelayanan Paten masih belum maksimal.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pengaron Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2023 dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 beserta analisisnya

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan Saran

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Kecamatan Pengaron mengampu urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dan Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan, urusan dan program yang diampu Kecamatan Pengaron bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Banjar yang merupakan upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam lima tahun mendatang.

Visi misi periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :
“Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, Agamis atau MANIS”,
yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Banjar dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana di bawah ini :

1. MAJU

Penjelasan :

- Maju dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan sebagai menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); berkembang.
- Maju dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembang menuju kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan ukuran atau indikator-indikator, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development*

2. MANDIRI

Penjelasan :

- Mandiri dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain.
- Artinya kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan.
- Mandiri dapat diartikan kemandirian daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bantuan dari pihak lain dengan mengoptimalkan potensi daerah.

3. AGAMIS

Penjelasan :

Agamis dapat diartikan sebagai orang yang beragama, dalam konteks ini adalah daerah yang beragama dengan makna sebagai daerah yang taat menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan atau daerah yang berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Beragama merupakan keyakinan-keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup, kehadiran dalam upacara peribadatan yang kesemuanya itu menunjukkan kepada ketaatan dan komitmen terhadap agama.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 7 (tujuh) misi yaitu :

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia

2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan
3. Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan
4. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif
6. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur
7. Menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan demokratis

Dalam mengupayakan terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2021 - 2026, secara umum Kecamatan Pengaron mendukung pencapaian kelima misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, berdasarkan urusan dan kewenangan serta tugas dan fungsi Kecamatan Pengaron berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke 4 dalam RPJMD 2021-2026 yakni **“4. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.”**

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama Kecamatan Pengaron sebanyak 1 (*satu*) indikator.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya Reformasi dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang (Rujukan : Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan	Camat	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten

			penyelenggara.	Masyarakat)		
1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	<p>Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan)</p>	<p>(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang</p> <p>Aspek yang dinilai meliputi :</p> <p>Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketertarikan dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.</p>	Camat	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten
1.	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Penilaian Mandiri Indeks kepatuhan dan kinerja intern Kecamatan	Penilaian mandiri indikator kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) Kecamatan merupakan salah satu instrumen untuk menilai tata kelola, manajemen risiko dan kematangan system	<p>Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern = \sum (Unsur kinerja utama x 40%) + (Unsur kepatuhan x 30%) + (Unsur Pelayanan Umum x 30 %)</p>	SEKRETARIS CAMAT	Hasil Penilaian Mandiri IKKI

			pengendalian intern di Kecamatan			
2.	Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan		Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang terlaksana : Total Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang terlaksana	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Pengaron
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana : Total jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Pengaron
4.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan		Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan : Total jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang terlaksana	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Kecamatan Pengaron

5.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang terlaksana : Total jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang terlaksana	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kecamatan Pengaron
6.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		Jumlah Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana : Total Jumlah Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Kecamatan Pengaron

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terfasilitasi		Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terfasilitasi : Total Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terfasilitasi	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Pengaron
2.	Terfasilitasinya rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana : Total Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Pengaron
3.	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana : Total jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kecamatan Pengaron
4.	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang terlaksana : Total Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang terlaksana	KASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	Kecamatan Pengaron
5.	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi		Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi : Total jumlah Koordinasi Penerapan dan	KASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	Kecamatan Pengaron

	Peraturan Kepala Daerah			Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi		
6.	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Yang Terlaksana : Total Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Yang Terlaksana	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Kecamatan Pengaron
7.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana : Total Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Kecamatan Pengaron
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Dokumen perencanaan terdiri dari : Dokumen Renja Murni, Dokumen Renja Perubahan, Perjanjian Kinerja (PK) Murni, Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan, RKT Murni, RKT Perubahan,	$\frac{\text{Jumlah Keseluruhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu}}{\text{Total Jumlah Keseluruhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu}}$	KASUBANG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Kecamatan Pengaron

			<p>Rencana Aksi, Tabel Keselarasan.</p> <p>Dokumen penganggaran terdiri dari : RKA Murni, RKA Perubahan, DPA Murni, DPA Perubahan.</p> <p>Dokumen evaluasi terdiri dari : Laporan Renja dan Laporan Fisik dan Keuangan Bulanan.</p> <p>Dokumen pelaporan kinerja : LKJIP, LKPJ</p> <p>Yang dimaksud tepat waktu adalah bahwa dokumen-dokumen tersebut di atas dapat diselesaikan penyusunan anya sesuai dengan waktu yang ditetapkan.</p> <p>Yang dimaksud dengan sesuai ketentuan : bahwa</p>		
--	--	--	--	--	--

			dalam penyusunan dokumen-dokumen tersebut di atas mengacu dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan jenis dokumen yang disusun.			
	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	<p>Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uang Persediaan (UP), 2. Ganti Uang (GU), 3. Langsung (LS), 4. Tambah Uang (TU) <p>Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah bahwa dokumen-dokumen tersebut dalam penyelesaian harus sesuai dengan waktu yang ditetapkan /</p>	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Penatausahaan Verifikasi Keuangan SKPD yang Disusun}}{\text{Jumlah Seluruh Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang Disusun Tepat Waktu}} \times 100\%$	KASUBANG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

			tidak boleh terlambat. Yang dimaksud dengan tepat mutu adalah bahwa dalam penyusunan dokumen-dokumen tidak boleh menyalahi spesifikasi yang berlaku sesuai dengan peraturan perundangannya.			
	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Terlaksananya dokumen pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan waktu yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	KASUBANG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu				
	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi				
	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan				

	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan				
	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasilinasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran				

Sumber : SK IKU Kecamatan Pengaron Tahun 2023

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2023 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2023 meliputi sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persen	85	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Pengaron	NILAI	74	2.453.299.280,00	CAMAT
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Pengaron	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Pengaron	NILAI	74						
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persen	100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persen	100	5.902.500	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	3.495.000	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Laporan	21	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Laporan	21	2.407.500	

	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	1.887.892.994	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	18	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	18	1.856.608.094	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	30.840.000	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	444.900	
	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Persen	100	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Persen	100	9.592.500	
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	2	592.500	
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	9.000.000	
	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Persen	25	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Persen	25	1.500.000	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,	Dokumen	1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,	Dokumen	1	1.500.000	

	Penilaian Kinerja Pegawai	dan Penilaian Kinerja Pegawai				dan Penilaian Kinerja Pegawai				
	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	124.403.286	
	j tersedianya jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.518.000	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	6.544.500	
	Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga	umlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	umlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	1.239.275	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.950.000	
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.202.025	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	105.949.486	
	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	persen	100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	persen	100	63.218.900	
	Tersedianya Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	63.218.900	
	Terselenggaranya jasa	Persentase Jasa	Persen	100	Penyediaan Jasa	Persentase Jasa	Persen	100	200.635.000	

	penunjang pelayanan umum kantor	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Tersedianya Jasa Surat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	2.000.000	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	35.000.000	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	163.635.000	
	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat darah	Persen	100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat darah	Persen	100	160.154.100	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	57.184.100	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	17.970.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	85.000.000	
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang	persen	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang	persen	100	18.048.000	KASI KESSOS

		Terlaksana				Terlaksana				
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Pelayanan Paten Dilaksanakan	Persen	100	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Pelayanan Paten Dilaksanakan	Persen	100	8.538.000	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	13	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	13	8.538.000	
	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan	Persen	100	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan	Persen	100	9.510.000	
	Terlaksananya Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	9.510.000	
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	persen	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	persen	100	41.663.500	KASI PEMBERDAYAAN
	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	41.663.500	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	Lembaga	5	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	Lembaga	5	11.224.000	

	Pembangunan di Desa	Perencanaan Pembangunan di Desa			Pembangunan di Desa	Perencanaan Pembangunan di Desa				
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	30.439.500	
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	persen	100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	persen	100	4.804.000	KASI TRANTIB
	Terseenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas	Persen	100	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas	Persen	100	1.652.000	
	Terlaksananya Kegiatan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	1	1.652.000	
	Terseenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Persen	100	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Persen	100	3.152.000	

	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kegiatan	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kegiatan	1	3.152.000	
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persen	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persen	100	105.813.000	KASI PEMERINTAHAN
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persen	100	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persen	100	105.813.000	
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	23.819.000	

Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	3	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	3	81.994.000	
Nilai Evaluasi Kecamatan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	persen	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	persen	100	5.554.000	
Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	5.554.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kegiatan	1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kegiatan	1	2.402.000	
Terlaksananya Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kegiatan	1	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kegiatan	1	3.152.000	

Sumber : Laporan Perjanjian Kinerja Perubahan Thn.2023 Kec.Pengaron

Dari tabel 2.2 diatas, dapat dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Pengaron tahun 2023 untuk tingkat program diampu oleh camat (eselon III) dan untuk tingkat kegiatan diampu oleh Kepala Seksi (Kasi di Kecamatan) dan Lurah (eselon IV), adapun target indikator kegiatan yang diampu oleh Sekretariat, Kepala Seksi di Kecamatan dan Lurah dapat diuraikan dibawah ini :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah target indikator 100 persen, dengan rincian aktivitasnya sebagai berikut :
 - Laporan terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan target indikator 100 persen, dengan rincian aktivitasnya sebagai berikut :
 - Laporan Pelayanan Umum Pemerintahan
 - Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan
3. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** target indikator 100 persen, dengan rincian aktivitasnya sebagai berikut :
 - Laporan Administrasi Kepegawaian
 - Laporan Barang Milik Daerah
 - Laporan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan
 - Laporan Pelayanan Paten
 - Laporan Penatausahaan Kantor
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
4. **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat** target indikator 100 persen, dengan rincian aktivitasnya sebagai berikut:
 - Laporan Koordinasi Puskessos

5. **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** target indikator 100 persen, dengan rincian aktivitasnya sebagai berikut:
 - Laporan koordinasi pemberdayaan masyarakat di Kecamatan
 - Laporan Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan
 - Laporan Pembinaan PKK
6. **Pemberdayaan desa** target indikator 100 persen, dengan rincian aktivitasnya sebagai berikut:
 - Laporan kegiatan musrenbang pramusrenbang
 - Laporan pemberdayaan masyarakat di desa sebanyak 12 desa
7. **Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Perda dan Perkada.** target indikator 100 persen, dengan rincian sebagai berikut:
 - Laporan Sosialisasi Perda di Kecamatan
8. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** target 100 persen dengan rincian sebagai berikut:
 - Laporan Penyelenggaraan Peringatan HUT RI di Kecamatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN LALU

Terdapat beberapa tahapan didalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah Perjanjian kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. untuk perjanjian kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2023.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kecamatan Pengaron Kab. Banjar tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 100\%$	Berhasil	Hijau
2	$70\% < 100\%$	Cukup Berhasil	Biru
3	$40\% < 70\%$	Kurang Berhasil	Kuning
4	$<40\%$	Tidak Berhasil	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realisasi	Capaian	Predikat
			Satuan	Tahun 2023		(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang	Nilai IKM	84	84.75	99.11.00	Cukup Berhasil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Pengaron		Nilai	74	88.99	100	Berhasil
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD		Persen	100	100	100%	Berhasil
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	13	13	100%	Berhasil

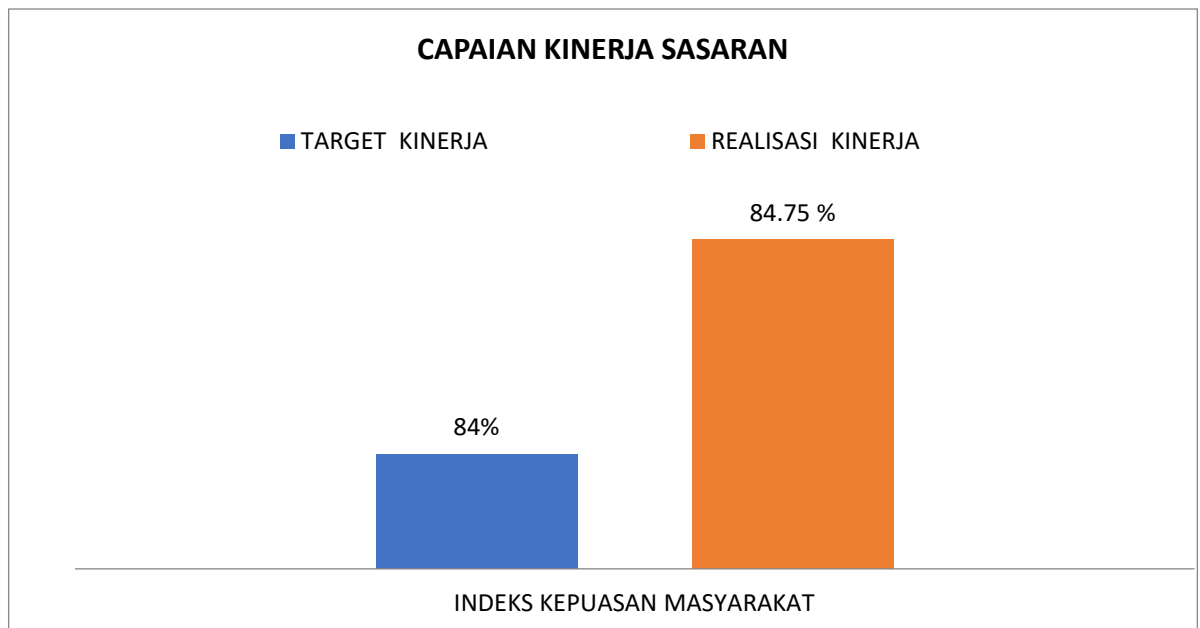
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Laporan	21	21	100%	Berhasil
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persen	100	100	100%	Berhasil
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang	18	18	100%	Berhasil
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen	1	1	100%	Berhasil
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan	1	1	100%	Berhasil
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun		Persen	100	100	100%	Berhasil
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Dokumen	2	2	100%	Berhasil
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan	1	1	100%	Berhasil
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi		Persen	25	25	100%	Berhasil
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen	1	1	100%	Berhasil
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persen	100	100	100%	Berhasil
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	1	1	100%	Berhasil
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	5	5	100%	Berhasil
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	umlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	7	7	100%	Berhasil
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	1	1	100%	Berhasil
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	1	1	100%	Berhasil
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	2	2	100%	Berhasil
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah		persen	100	100		

Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Paket	4	4		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persen	100	100		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	1	1		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	2	2		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	1	1		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah		Persen	100	100		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	1	1		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	5	5		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	3	3		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		persen	100	100		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Pelayanan Paten Dilaksanakan		Persen	100	100		
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	13	13		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan		Persen	100	100		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Laporan	4	4		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		persen	100	100		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persen	100	100		

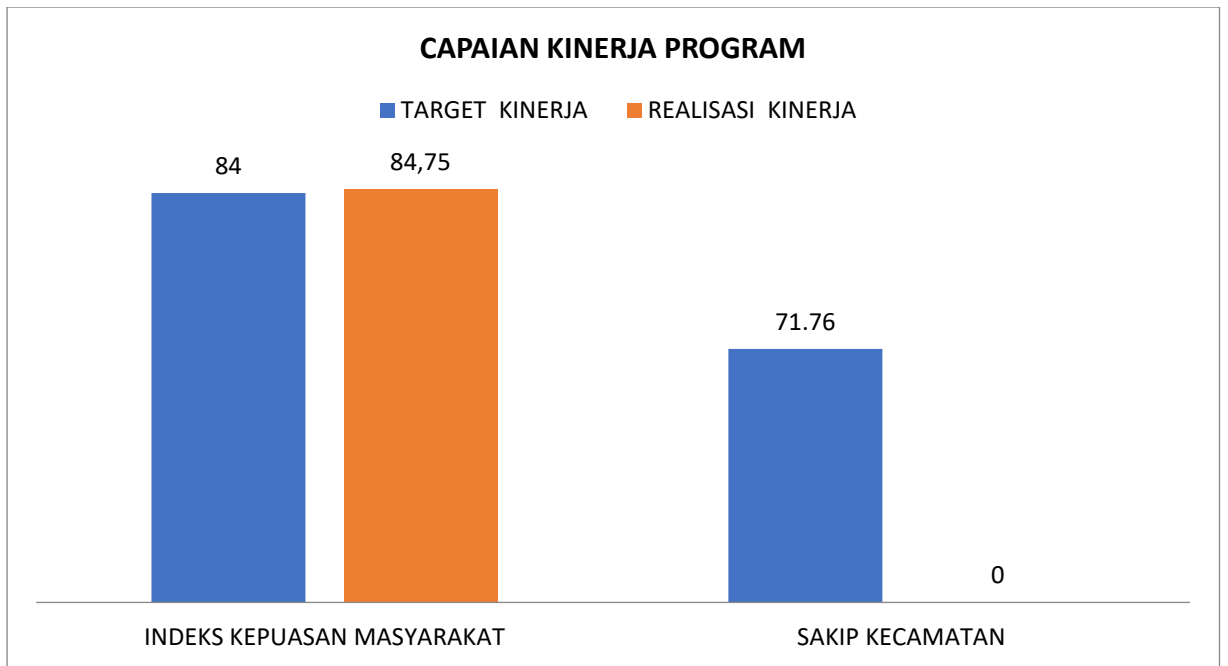
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Lembaga	5	5		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	4	4		
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan		persen	100	100		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas		Persen	100	100		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kegiatan	1	1		
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi		Persen	100	100		
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Kegiatan	1	1		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		persen	100	100		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi		Persen	100	100		
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Orang	100	100		

Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Kegiatan	3	3		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		persen	100	100		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persen	100	100		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Kegiatan	1	1		
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Kegiatan	1	1		

Sumber : Laporan SKM Kec.Pengaron Thn.2023



Indikator kinerja Sasaran Strategis Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi kinerjanya sebesar 84.75 % , bila di bandingkan dengan target 84% maka capaian kinerja untuk Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 99.11% dengan capaian tersebut maka kinerja masuk dalam kategori **Cukup Berhasil**.



Untuk sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Instansi Kecamatan dengan indikatornya nilai SAKIP Kecamatan Pengaron tahun 2023 dengan target sebesar 62 (sesuai dengan matriks perubahan Renstra), dan untuk nilai SAKIP Kecamatan Pengaron Tahun 2023 memperoleh Nilai 71,76.

A.2 PERBANDINGAN REALISASI DENGAN CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan bagian dari kinerja strategis Kecamatan Pengaron sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	2022		2023	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	11	12	13	14
	SAKIP Kecamatan	Penilaian Inspektorat atas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	47,37	76%	71,76	89%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang	Indeks	84.75	99.11%	84,76	99.11%
	Nilai Evaluasi Kecamatan		Nilai	57,95	82,78%	94,00	100%
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Pengaron		Indeks	77,06	94,73%	88,99	100 %
	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD		Persen		100%	100%	100%

Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persen		100%	100%	100%
Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun		Persen		100%	100%	100%
Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi		Persen		100%	100%	100%
Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persen		100%	100%	100%
Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah		Persen		100%	100%	100%
Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persen		100%	100%	100%
Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah		Persen		100%	100%	100%
Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		Persen		100%	100%	100%

Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persen		100%	100%	100%
Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persen		100%	100%	100%
Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		Persen		100%	100%	100%
Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persen		100%	100%	100%
Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan		Persen		100%	100%	100%
Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi		Persen		100%	100%	100%
Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan		Persen		100%	100%	100%

Ketertiban Umum di Kecamatan							
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persen		100%	100%	100%	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi		Persen		100%	100%	100%	
Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan		Persen		100%	100%	100%	
Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD		Persen		100%	100%	100%	
Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persen		100%	100%	100%	

Sumber : Renstra Perubahan Kec.Pengaron Thn.2021-2026

Berdasarkan data pada tabel 3.3 di atas tentang Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 20223 dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 Pada Indikator kegiatan tidak mengalami perubahan realisasi yang capaian 100%.

Tabel 3.4
Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja
Program dan Kegiatan SKPD beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2021-2026

SKPD : KECAMATAN PENGARON

Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Target pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-6			-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten			84	2.805.247.037	85	2.917.456.918	86	3.034.155.195	87	3.155.521.403	88,31	3.281.742.259	88,31	15.194.122.813	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai		70	2.805.247.037	77	2.917.456.918	79	3.034.155.195	82	3.155.521.403	85	3.281.742.259	85	15.194.122.813	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura	Nilai	NA	73,00	2.619.364.237	74,00	2.724.138.806	76,00	2.833.104.359	78,00	2.946.428.533	80,00	3.064.285.674	80,00	14.187.321.610	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD			100%	7.050.000	100%	7.332.000	100%	7.625.280	100%	7.930.291	100%	8.247.503	100%	38.185.074	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang Tersusun			6 Dokumen	405.000	6 Dokumen	421.200	6 Dokumen	438.048	6 Dokumen	455.570	6 Dokumen	473.793	6 Dokumen	2.193.611	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Tersusun			1 dokumen	660.000	1 dokumen	686.400	1 dokumen	713.856	1 dokumen	742.410	1 dokumen	772.107	1 dokumen	3.574.773	Kec. Pengaron	Kab. Banjar

Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Tersusun			1 dokumen	500.000	1 dokumen	520.000	1 dokumen	540.800	1 dokumen	562.432	1 dokumen	584.929	1 dokumen	2.708.161	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Tersusun			1 dokumen	825.000	1 dokumen	858.000	1 dokumen	892.320	1 dokumen	928.013	1 dokumen	965.133	1 dokumen	4.468.466	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Tersusun			1 dokumen	660.000	1 dokumen	686.400	1 dokumen	713.856	1 dokumen	742.410	1 dokumen	772.107	1 dokumen	3.574.773	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun			4 dokumen	2.000.000	4 dokumen	2.080.000	4 dokumen	2.163.200	4 dokumen	2.249.728	4 dokumen	2.339.717	4 dokumen	10.832.645	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun			2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.080.000	2 Dokumen	2.163.200	2 Dokumen	2.249.728	2 Dokumen	2.339.717	2 Dokumen	10.832.645	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	2.330.472.837	100%	2.423.691.750	100%	2.520.639.420	100%	2.621.464.997	100%	2.726.323.597	100%	12.622.592.603	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		14 Bulan	2.303.172.837	14 Bulan	2.395.299.750	14 Bulan	2.491.111.740	14 Bulan	2.590.756.210	14 Bulan	2.694.386.459	14 Bulan	12.474.726.997	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1	24.300.000	277 desa	25.272.000	277 desa	26.282.880	277 desa	27.334.195	277 desa	28.427.563	277 desa	131.616.638	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	-	1	3.000.000		3.120.000		3.244.800		3.374.592		3.509.576		16.248.968	Kec. Pengaron	Kab. Banjar

Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun			100%	10.500.000	100%	10.920.000	100%	11.356.800	100%	11.811.072	100%	12.283.515	100%	56.871.387	Kec. Pengaron	Kab . Banjar
Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana			4 Laporan	1.500.000	4 Laporan	1.560.000	4 Laporan	1.622.400	4 Laporan	1.687.296	4 Laporan	1.754.788	4 Laporan	8.124.484	Kec. Pengaron	Kab . Banjar
Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun			1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		Kec. Pengaron	Kab . Banjar
Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD,(Honorarium Pengurusan Barang Pengguna)			12 Bulan	9.000.000	12 Bulan	9.360.000	12 Bulan	9.734.400	12 Bulan	10.123.776	12 Bulan	10.528.727	12 Bulan	48.746.903	Kec. Pengaron	Kab . Banjar
Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi		-	100%	11.500.000	100%	11.960.000	100%	12.438.400	100%	12.935.936	100%	13.453.373	100%	62.287.709	Kec. Pengaron	Kab . Banjar
Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang Tersusun		-	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.560.000	1 Laporan	1.622.400	1 Laporan	1.687.296	1 Laporan	1.754.788	1 Laporan	8.124.484	Kec. Pengaron	Kab . Banjar
Jumlah ASN yang Paham Tentang Materi Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang Terlaksana			1 Orang	10.000.000	1 Orang	10.400.000	1 Orang	10.816.000	1 Orang	11.248.640	1 Orang	11.698.586	1 Orang	54.163.226	Kec. Pengaron	Kab . Banjar
Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	31.428.400	100%	32.685.536	100%	33.992.957	100%	35.352.676	100%	36.766.783	100%	170.226.352	Kec. Pengaron	Kab . Banjar
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga			5 Jenis	2.000.000	5 Jenis	2.080.000	5 Jenis	2.163.200	5 Jenis	2.249.728	5 Jenis	2.339.717	5 Jenis	10.832.645	Kec. Pengaron	Kab . Banjar

n Bangunan Kantor																
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2 Jenis	5.000.000	2 Jenis	5.200.000	2 Jenis	5.408.000	2 Jenis	5.624.320	2 Jenis	5.849.293	2 Jenis	27.081.613	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			7 Jenis	1.478.400	7 Jenis	1.537.536	7 Jenis	1.599.037	7 Jenis	1.662.999	7 Jenis	1.729.519	7 Jenis	8.007.491	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Tersedianya Bahan Logistik Kantor			23 Jenis	4.950.000	23 Jenis	5.148.000	23 Jenis	5.353.920	23 Jenis	5.568.077	23 Jenis	5.790.800	23 Jenis	26.810.797	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah SKPD			12 Bulan	18.000.000	12 Bulan	18.720.000	12 Bulan	19.468.800	12 Bulan	20.247.552	12 Bulan	21.057.454	12 Bulan	97.493.806	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah			100%	2.410.000	100%	2.506.400	100%	2.606.656	100%	2.710.922	100%	2.819.359	100%	13.053.337	Kec. Pengaron	
Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang di Beli			1 Jenis	2.410.000	1 Jenis	2.506.400	1 Jenis	2.606.656	1 Jenis	2.710.922	1 Jenis	2.819.359	1 Jenis	13.053.337	Kec. Pengaron	
Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	170.340.000	100%	177.153.600	100%	184.239.744	100%	191.609.334	100%	199.273.707	100%	922.616.385	Kec. Pengaron	
Tersedianya Jasa Surat Menyurat			12 Bulan	1.000.000	12 Bulan	1.040.000	12 Bulan	1.081.600	12 Bulan	1.124.864	12 Bulan	1.169.859	12 Bulan	5.416.323	Kec. Pengaron	
Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air Bersih dan Internet			12 Bulan	3.900.000	12 Bulan	4.056.000	12 Bulan	4.218.240	12 Bulan	4.386.970	12 Bulan	4.562.448	12 Bulan	21.123.658	Kec. Pengaron	
Terbayarnya BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan			12 Bulan	165.440.000	12 Bulan	172.057.600	12 Bulan	178.939.904	12 Bulan	186.097.500	12 Bulan	193.541.400	12 Bulan	896.076.404	Kec. Pengaron	
Terbayarnya Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			13 Bulan		13 Bulan	0	13 Bulan	0	13 Bulan	0	13 Bulan	0	13 Bulan	0	Kec. Pengaron	

Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat darah			100%	55.663.000	100%	57.889.520	100%	60.205.101	100%	62.613.305	100%	65.117.837	100%	301.488.763	Kec. Pengaron	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara			10 Unit	49.933.000	10 Unit	51.930.320	10 Unit	54.007.533	10 Unit	56.167.834	10 Unit	58.414.547	10 Unit	270.453.234	Kec. Pengaron	
Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Terpelihara			4 Jenis	5.730.000	4 Jenis	5.959.200	4 Jenis	6.197.568	4 Jenis	6.445.471	4 Jenis	6.703.290	4 Jenis	31.035.528	Kec. Pengaron	
Indeks Kepuasan Manusia Kecamatan Pengaron		80,19	81,00	54.795.600	82,00	56.987.424	83,00	59.266.921	84,00	61.637.598	85,00	64.103.102	85,00	296.790.644	Kec. Pengaron	Kab · Banjar
Presentase Pelayanan Paten Dilaksanakan			100%	14.936.400	100%	15.533.856	100%	16.155.210	100%	16.801.419	100%	17.473.475	100%	80.900.360	Kec. Pengaron	Kab · Banjar
Jenis pelayanan paten sesuai SOP yang di laksanakan kecamatan		-	17 SOP	14.936.400	17 SOP	15.533.856	17 SOP	16.155.210	17 SOP	16.801.419	17 SOP	17.473.475	17 SOP	80.900.360	Kec. Pengaron	Kab · Banjar
Presentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan		-	100%	39.859.200	100%	41.453.568	100%	43.111.711	100%	44.836.179	100%	46.629.626	100%	215.890.284	Kec. Pengaron	Kab · Banjar
Jumlah koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan			4 Kegiatan	39.859.200	4 Kegiatan	41.453.568	4 Kegiatan	43.111.711	4 Kegiatan	44.836.179	4 Kegiatan	46.629.626	4 Kegiatan	215.890.284	Kec. Pengaron	Kab · Banjar
Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		NA	100%	45.000.000	100%	46.800.000	100%	48.672.000	100%	50.618.880	100%	52.643.635	100%	243.734.515	Kec. Pengaron	
Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan			100%	45.000.000	100%	46.800.000	100%	48.672.000	100%	50.618.880	100%	52.643.635	100%	243.734.515	Kec. Pengaron	

MusDes/MusKel yang tepat waktu																
Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes tepat waktu terlaksananya Murenbang Tingkat Kecamatan			2 Kegiatan	20.000.000	2 Kegiatan	20.800.000	2 Kegiatan	21.632.000	2 Kegiatan	22.497.280	2 Kegiatan	23.397.171	2 Kegiatan	108.326.451	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes tepat waktu terlaksananya Murenbang Tingkat Kecamatan			12 Desa		12 Desa		12 Desa		12 Desa		12 Desa		12 Desa		Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Jumlah Bundes yang Terdata Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan Jumlah PKK Desa yang Terbina Jumlah UMKM yang Didta			4 Kali	25.000.000	4 Kali	26.000.000	4 Kali	27.040.000	4 Kali	28.121.600	4 Kali	29.246.464	4 Kali	135.408.064	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Jumlah Bundes yang Terdata Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan Jumlah PKK Desa yang Terbina Jumlah UMKM yang Didta			5 Buah		5 Buah	0	5 Buah	0	5 Buah	0	5 Buah	0	5 Buah	0	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Jumlah Bundes yang Terdata Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan Jumlah PKK Desa yang Terbina Jumlah UMKM yang Didta			12 Desa		12 Desa		12 Desa		12 Desa		12 Desa		12 Desa		Kec. Pengaron	

Jumlah Bundas yang Terdata Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan Jumlah PKK Desa yang Terbina Jumlah UMKM yang Didta			12 UMKM		12 UMKM		12 UMKM		12 UMKM		12 UMKM		12 UMKM		Kec. Pengaron	
Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas		NA	100%	13.429.600	100%	13.966.784	100%	14.525.455	100%	15.106.474	100%	15.710.733	100%	72.739.045	Kec. Pengaron	Kab · Banjar
Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas			100%	9.125.600	100%	9.490.624	100%	9.870.249	100%	10.265.059	100%	10.675.661	100%	49.427.193	Kec. Pengaron	Kab · Banjar
Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Intansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang Terfasilitasi			1 Kegiatan	5.821.600	1 Kegiatan	6.054.464	1 Kegiatan	6.296.643	1 Kegiatan	6.548.508	1 Kegiatan	6.810.449	1 Kegiatan	31.531.663	Kec. Pengaron	Kab · Banjar
Jumlah Rakor FKUB yang dilaksanakan			1 Kegiatan	3.304.000	1 Kegiatan	3.436.160	1 Kegiatan	3.573.606	1 Kegiatan	3.716.551	1 Kegiatan	3.865.213	1 Kegiatan	17.895.530	Kec. Pengaron	Kab · Banjar
Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas			100%	4.304.000	100%	4.476.160	100%	4.655.206	100%	4.841.415	100%	5.035.071	100%	23.311.852	Kec. Pengaron	Kab · Banjar
Jumlah Koordinasi/Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengadaan Peraturan Perundang-Undangan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang			1 Kegiatan	4.304.000	1 Kegiatan	4.476.160	1 Kegiatan	4.655.206	1 Kegiatan	4.841.415	1 Kegiatan	5.035.071	1 Kegiatan	23.311.852	Kec. Pengaron	Kab · Banjar

Terfasilitasi																
Angka stabilitas keamanan lokal		NA	0	42.354.400	0	44.048.576	0	45.810.519	0	47.642.940	0	49.548.657	0	229.405.092	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi			0	42.354.400	0	44.048.576	0	45.810.519	0	47.642.940	0	49.548.657	0	229.405.092	Kec. Pengaron	
Terlaksananya APEL HUT RI di Kecamatan Simpang Empat			1 Kegiatan	15.400.400	1 Kegiatan	16.016.416	1 Kegiatan	16.657.073	1 Kegiatan	17.323.356	1 Kegiatan	18.016.290	1 Kegiatan	83.413.534	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan			3 Kegiatan	26.954.000	3 Kegiatan	28.032.160	3 Kegiatan	29.153.446	3 Kegiatan	30.319.584	3 Kegiatan	31.532.368	3 Kegiatan	145.991.558	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		NA	100%	30.303.200	100%	31.515.328	100%	32.775.941	100%	34.086.979	100%	35.450.458	100%	164.131.906	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			100%	30.303.200	100%	31.515.328	100%	32.775.941	100%	34.086.979	100%	35.450.458	100%	164.131.906	Kec. Pengaron	Kab. Banjar

Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi			2 Kegiatan	5.731.600	2 Kegiatan	5.960.864	2 Kegiatan	6.199.299	2 Kegiatan	6.447.271	2 Kegiatan	6.705.161	2 Kegiatan	31.044.194	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa yang Terfasilitasi			1 Kegiatan	2.831.600	1 Kegiatan	2.944.864	1 Kegiatan	3.062.659	1 Kegiatan	3.185.165	1 Kegiatan	3.312.571	1 Kegiatan	15.336.859	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pambakal)			2 Kegiatan	15.000.000	2 Kegiatan	15.600.000	2 Kegiatan	16.224.000	2 Kegiatan	16.872.960	2 Kegiatan	17.547.878	2 Kegiatan	81.244.838	Kec. Pengaron	Kab. Banjar
Penetapan dan Penegasan Segmen Batas Desa dan Batas Kecamatan			5 Kegiatan	6.740.000	5 Kegiatan	7.009.600	5 Kegiatan	7.289.984	5 Kegiatan	7.581.583	5 Kegiatan	7.884.847	5 Kegiatan	36.506.014	Kec. Pengaron	Kab. Banjar

Sumber : Renstra Perubahan Kecamatan Pengaron Thn. 2021-2026

A.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA

Indikator kinerja sasaran Tahun 2023 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja tahun 2023 Perubahan Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja Perubahan Renstra 2023, untuk mengetahui kemampuan Kecamatan Pengaron selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Renstra

Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Target Renstra (2023)	Realisasi Tahun 2023	Capaian Periode Akhir Renstra (2023)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang	Nilai IKM	85	84.75	99.70%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Pengaron		Nilai	74	88,99	100%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD		persen	100	100	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persen	100	100	100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun		persen	100	100	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi		persen	100	100	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		persen	100	100	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah		persen	100	100	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		persen	100	100	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah		persen	100	100	100%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		persen	100	100	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		persen	100	100	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		persen	100	100	100%

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		persen	100	100	100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		persen	100	100	100%

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Kec.Pengaron Thn.2023

Berdasarkan data pada tabel 3.4 tentang Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Renstra di atas menunjukan bahwa Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan dan Sasaran Program Terlaksananya Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sedangkan Indikator Sasaran Program SAKIP kecamatan tahun 2023 sampai dengan waktu disusunnya laporan ini nilai SAKIP masih belum ada atau belum keluar hasilnya karena Inspektorat belum melakukan evaluasi dan penilaian atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk indikator kegiatan yang di laksanakan pada tahun 2023 semua indikator kegiatan telah mencapai target Renstra di tahun 2023.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

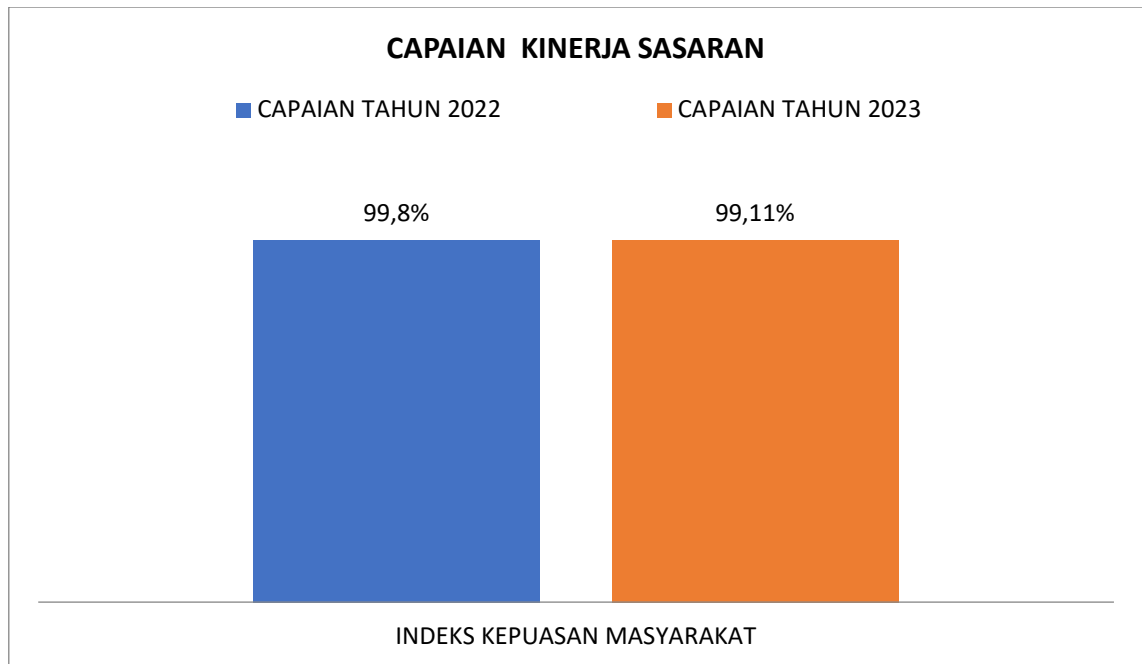
Pada tahun 2023 berdasarkan renstra perubahan ditetapkan satu sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat , terdapat Indikator Kinerja dengan capaian **Cukup Berhasil** . Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%) Thn. 2023
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,75	99,8%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Tahun 2023



Capaian kinerja Sasaran Strategis Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 99,11 % di bandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 99,8 % maka pada tahun 2023 ini terdapat nilai lebih tinggi capaian kinerja dan nilai tersebut telah mencapai target tahun 2023 yaitu 85 yang sudah di tentukan.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Pengaron sudah tentu ada faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang dijalankan sehingga tercapai tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kecamatan Pengaron, dari analisa yang dilakukan di pelayanan Kecamatan Pengaron dapat disimpulkan faktor - faktor yang mempengaruhi pelayanan tersebut, yaitu :

1. Faktor Pendukung dalam mencapai sasaran, program dan kegiatan

a. Faktor kesadaran aparatur Kecamatan Pengaron

Kesadaran dan disiplin serta dedikasi yang tinggi terhadap tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat yang dimiliki oleh setiap aparatur/petugas pelayanan di Kecamatan Pengaron sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan

b. Faktor Aturan (SOP) yang digunakan Kecamatan Pengaron

Pemahaman aparatur/ petugas pelayanan Kecamatan Pengaron yang

cukup baik terhadap standar operasional pelayanan (SOP) yang dijalankan sehingga menghasilkan pelayanan yang baik, bersih dan amanah

c. Faktor organisasi/SKPD Kecamatan Pengaron

Petugas pelayanan dan aparatur Kecamatan Pengaron sudah memahami cukup baik terhadap tugas dan tanggung jawab serta adanya kerjasama yang baik antar bidang/seksi sehingga dapat menciptakan pelayanan yang terbaik

d. Faktor kemampuan dan SDM Kecamatan Pengaron

Aparatur/petugas pelayanan Kecamatan Pengaron walaupun Jumlahnya belum memadai namun memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat

e. Faktor sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Pengaron

Kecamatan Pengaron mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, walaupun sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Pengaron belum memadai

2. Faktor penghambat keberhasilan

1. Faktor kemampuan yang dimiliki Kecamatan Pengaron

Faktor kemampuan dan jumlah aparatur atau petugas pelayanan Kecamatan Pengaron yang masih minim menjadi faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pelayanan

2. Faktor kualitas sumber daya aparatur/ petugas pelayanan Kecamatan Pengaron

Masih rendahnya kualitas dan sumber daya manusia yang dimiliki Kecamatan Pengaron sehingga tidak terjalin komunikasi yang lancar sehingga menyebabkan pelayanan terhambat dan terlambat

3. Faktor sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Pengaron

Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Pengaron juga sangat memengaruhi proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran:

Capaian realisasi tingkat sasaran Kecamatan Pengaron tergolong kategori berhasil, namun keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut tentunya masih

ada kendala yang menjadi catatan penting untuk tahun mendatang, yaitu :
Belum optimalnya pelayanan Admimnistrasi terpadu kecamatan (PATEN),
yang disebabkan antara lain :

1. Pengguna layanan yang datang ke Pelayanan Kecamatan masih banyak yang belum memahami ketentuan dan persyaratan yang sudah ditetapkan dalam SOP, sehingga menyebabkan pelayanan menjadi lambat dan terhambat
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pelayanan Kecamatan.
3. Disamping kurangnya tenaga pelayanan yang dimiliki oleh Kecamatan Pengaron, ditambah lagi ada PNS Kecamatan Pengaron yang sakit tidak bisa melaksanakan tugas dan pension sehingga proses pelayanan menjadi terhambat

Upaya perbaikan :

1. Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) telah melengkapi sarana dan prasarana berupa 1 (satu) buah PC/Unit Komputer sebagai langkah untuk peningkatan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
2. Pimpinan SKPD (Kecamatan Pengaron) selalu memberikan arahan pada setiap apel gabungan di Kecamatan Pengaron kepada aparatur pemerintahan Kecamatan, dan Desa (Sekdes) untuk meningkatkan disiplin kerja dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pengguna layanan sehingga terjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam hal pelayanan.
3. Terus menerus melakukan perbaikan sarana dan prasarana dengan anggaran yang secukupnya dan juga merapikan administrasi.
4. Pimpinan SKPD (Kecamatan Pengaron) telah meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai kontrak Kecamatan Pengaron berupa peningkatan Honorarium.

Tindak lanjut yang akan datang:

1. Memperbaiki sistem layanan dengan layanan terpadu 1 (satu) pintu
Sebagai contoh : masyarakat (pengguna layanan) yang ingin membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tempat tinggal, maka ia cukup datang di 1

(satu) loket saja, dan akan diberikan blanko dan persyaratan yang harus dilengkapi.

2. Menambah jumlah loket layanan untuk mengurangi antrian dan mempercepat layanan.
3. Menambah jam pelayanan (Pelayanan Tanpa Istirahat).
4. Melakukan layanan jemput bola atau melakukan pelayanan keliling ke Kelurahan dan Desa.
5. Menyediakan ruangan/bilik menyusui bagi pengguna layanan yang membawa bayi/balita.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023 Kecamatan Pengaron mengelola anggaran sebesar Rp. 2.629.181.780, untuk membiayai pelaksanaan, enam program, lima belas kegiatan dan tiga puluh dua sub kegiatan, dengan pembagian alokasi Rp. 2.629.181.780, untuk Belanja Operasi yang terdiri atas Rp 1.896.448.094 untuk Belanja Pegawai, Rp 598.464.786 Belanja Barang Dan Jasa, adapun alokasi untuk Belanja Modal adalah sebesar Rp 74.268.900, Untuk Realisasi jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6

Realisasi Jenis Belanja

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase capaian
1.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.000.000	59.889.000	99,81 %
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.268.900	73.949.000	99,56 %
	Belanja Barang dan Jasa	598.464.786	578.902.154	96,73 %
2.	Belanja Pegawai	1.896.448.094	1.641.926.528	86,57 %
	TOTAL	2.629.181.780	2.354.666.682	89.56%

Sumber : Realiasi keuangan Aplikasi Fmis 2023

Pada tabel 3.7 menjelaskan bahwa Kecamatan Pengaron mengelola Belanja Operasi sebesar Rp. 2.629.181.780 dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 2.354.666.682 (89,56%) yang terbagi menjadi, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 60.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 59.889.000 (99,81 %), kemudian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp 74.268.900 dengan realisasi Rp 73.949.000 (99,56 %), Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 598.464.786 dengan realisasi sejumlah 578.902.154 (96,73 %) dan Belanja Pegawai sebesar Rp 1.896.448.094 dengan realisasi sejumlah Rp 1.641.926.528 (86,57 %).

Untuk perbandingan pencapaian sasaran kinerja dengan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target		Realisasi		Penanggung Jawab
							(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Pengaron	Nilai	74	74	2.453.299.280	88.99	2.155.681.682	Sekretaris Camat
			<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD</i>	<i>Persen</i>	100	100	5.902.500	100	5.902.500	Sekretaris Camat
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	13	3.495.000	13	3.495.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
				Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Laporan	21	21	2.407.500	21	2.314.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
				Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
			<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persen</i>	100	100	1.887.892.994	100	1.887.892.994	Sekretaris Camat
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	18	13	1.856.608.094	18	1.602.086.528	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
				Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	30.840.000	1	30.840.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
				Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	444.900	1	160.400	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
				Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun</i>	<i>Persen</i>	100	100	9.592.500	100	9.592.500	Sekretaris Camat			
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	2	2	592.500	2	410.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan			

	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	9.000.000	1	9.000.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi</i>	<i>Persen</i>	25	100	1.500.000	100	1.500.000	<i>Sekretaris Camat</i>
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	1.500.000	1	1.500.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persen</i>	100	100	124.403.286	100	124.403.286	<i>Sekretaris Camat</i>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	3.518.000	1	3.500.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	6.544.500	5	6.247.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	umlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	7	1.239.275	7	1.200.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	4.950.000	1	4.937.790	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	2.202.025	1	2.120.500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2	105.949.486	2	102.370.680	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah</i>	<i>persen</i>	100	100	63.218.900	100	63.218.900	<i>Sekretaris Camat</i>
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	4	63.218.900	4	62.686.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persen</i>	100	100	200.635.000	100	200.635.000	<i>Sekretaris Camat</i>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	2	35.000.000	2	32.281.500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	163.635.000	1	155.373.408	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>160.154.100</i>	<i>100</i>	<i>160.154.100</i>	<i>Sekretaris Camat</i>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	57.184.100	1	55.686.782	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	17.970.000	5	17.583.094	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	85.000.000	3	59.889.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	persen	100	100	18.048.000	100	17.820.000	Camat
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>Persentase Pelayanan Paten Dilaksanakan</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>8.538.000</i>	<i>100</i>	<i>8.538.000</i>	<i>Camat</i>
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	13	13	8.538.000	13	8.320.000	Kasi Kesos
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Kasi Kesos
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Persentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>9.510.000</i>	<i>100</i>	<i>9.510.000</i>	<i>Camat</i>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	4	9.510.000	4	9.500.000	Kasi Kesos
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Kasi Kesos
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	persen	100	100	41.663.500	100	40.556.000	Camat
<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>41.663.500</i>	<i>100</i>	<i>41.663.500</i>	<i>Camat</i>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	5	5	11.224.000	5	11.200.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	30.439.500	4	29.356.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	persen	100	100	4.804.000	100	4.585.000	Camat
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Persentase Fasilitasi Penanganan Trambulinmas</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>1.652.000</i>	<i>100</i>	<i>1.652.000</i>	<i>Camat</i>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	1	1	1.652.000	1	1.585.000	Kasi Trantib
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Kasi Trantib
<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	<i>Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>3.152.000</i>	<i>100</i>	<i>3.152.000</i>	<i>Camat</i>
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kegiatan	1	1	3.152.000	1	3.000.000	Kasi Trantib
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Kasi Trantib
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persen	100	100	105.813.000	100	105.470.000	Camat
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>105.813.000</i>	<i>100</i>	<i>105.813.000</i>	<i>Camat</i>
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	0	23.819.000	100	23.650.000	Kasi Pemerintahan
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Kasi Pemerintahan
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	3	3	81.994.000	3	81.820.000	Kasi Pemerintahan
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Kasi Pemerintahan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	persen	100	100	5.554.000	100	5.554.000	Camat
<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>5.554.000</i>	<i>100</i>	<i>5.554.000</i>	<i>Camat</i>

		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kegiatan	1	1	2.402.000	1	2.402.000	Kasi Pemerintahan
			Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	75	74		83.51.00		Kasi Pemerintahan
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kegiatan	1	1	3.152.000	1	3.152.000	Kasi Pemerintahan
			Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	74	74		83.51.00		Kasi Pemerintahan

sumber : Laporan Evaluasi RKPD Kec.Pengaron Thn.2023

C.1 ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk kegiatan yang pencapaian kinerjanya mencapai 100 %. Untuk kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah, mencapai kinerja sebanyak 100% namun dengan realisasi anggaran sebanyak 90,34% dari total anggaran yang dialokasikan. kegiatan Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak 91,36% dari total anggaran yang dialokasikan. kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak 43,41% dari total anggaran yang dialokasikan. kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak 88,60% dari total anggaran yang dialokasikan. kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa , mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak 99,51% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak 87,66% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, mencapai kinerja sebanyak 100 % dan dengan realisasi anggaran sebanyak 100% dari total anggaran yang dialokasikan.

Banyaknya kegiatan yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik, dan lebih jauh juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.8
Efisien Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%) 6 (100% - Kol 5)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Beruntung Baru	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Pengaron	83	87,87	94,5
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	98,4	98,4
3	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	100
4	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100	96	96,1
5	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	87	86,5
6	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	86	86,3
7	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	100	100
8	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	36	36,1

9	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	98	98,1
10	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	69	69,2
11	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	100	100
12	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	100	100,0
13	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100	100	100,0
14	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	97	96,8
15	J Terseduanya jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	99	99,5
16	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	95	95,5
17	Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga	umlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	97	96,8
18	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	100	99,8
19	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	96	96,3
20	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	97	96,6
21	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100	99	99,2
22	Tersedianya Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	99	99,2
23	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	95	94,5

24	Tersedianya Jasa Surat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100	100
25	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	92	92,2
26	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	95	95,0
27	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat darah	100	83	83,1
28	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	97	97,4
29	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	98	97,8
30	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	70	70,5
31	Nilai Evaluasi Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	99	98,7
32	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Pelayanan Paten Dilaksanakan	100	97	97,4
33	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	97	97,4
34	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Presentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan	100	100	99,9
35	Terlaksananya Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100	100	99,9

36	Nilai Evaluasi Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	97	97,3
37	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	97	97,3
38	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	100	99,8
39	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	96	96,4
40	Nilai Evaluasi Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100	95	95,4
41	Terseenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas	100	96	95,9
42	Terlaksananya Kegiatan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100	96	95,9
43	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	95	95,2
44	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	95	95,2

45	Nilai Evaluasi Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	99,7
46	Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	100	99,7
47	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	99	99,3
48	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100	100	99,8
49	Nilai Evaluasi Kecamatan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100	100	100
50	Terseleenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100
51	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100	100	100
52	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	100	100	100

D. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

D.1. EVALUASI KINERJA TAHUN 2023

Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja Kecamatan Pengaron (Nilai SAKIP Tahun 2023) memperoleh nilai 71,76 dengan interpretasi predikat BB, Kecamatan Pengaron kedepannya bertekad akan lebih banyak melakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Bappedalitbang dan Inspektorat terkait Dokumen SAKIP untuk bisa meningkatkan nilai SAKIP Kecamatan Pengaron yang lebih baik dari tahun - tahun sebelumnya dengan target untuk Tahun 2022 yaitu sebesar 62 atau dengan kategori BB.

Berikut ini adalah uraian singkat hasil evaluasi tahun 2020 yang diberikan Inspektorat Kabupaten Banjar, Sebagai berikut:

1. Dokumen Renja belum dijadikan pedoman dalam menyusun dokumen anggaran
2. Indikator kinerja langsung belum sepenuhnya di breakdown ke indicator kinerja bawahannya
3. Laporan kinerja belum menyajikan informasi capaian indicator Kinerja Utama secara lengkap (output-ouput yang dianggap penting)
4. Informasi mengenai kinerja belum dapat ditelusuri sumber datanya
5. Hasil pengukuran (capaian) kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan Punishment
6. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dikembangkan menggunakan teknologi informasi.

D.2. TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Kecamatan Pengaron telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

Tabel 3.9
Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat

No	Rekomendasi Inspektorat	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Menjadikan dokumen renja sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen anggaran	Sudah dilaksanakan	Pada Dokumen DPA dengan Aplikasi SIPD Tahun 2023
2	Menyusun Indikator Kinerja dengan memperhatikan Kinerja Utama atasan langsung	Sudah dilaksanakan	Pada Dokumen DPA, PK Tahun 2023
3	Laporan kinerja dapat menyajikan informasi evaluasi kinerja sampai dengan level kegiatan (Ouput)	Sudah dilaksanakan	Pada Dokumen Laporan Capaian Kinerja Bulanan Tahun 2023
4	Mencantumkan asal sumber data informai kinerja	Sudah dilaksanakan	Pada Dokumen LKJIP Tahun 2023
5	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara terintegritas mulai dari perencanaan, penganggaran, informasi kinerja hingga pelaporan.	Sudah dilaksanakan	Penggunaan Aplikasi Tepra Tahun 2023 dan Simondalev, dan SIPD Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Realisasi capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pengaron termasuk dalam predikat cukup berhasil dengan nilai capaian sebesar 96,86 %. Dan sasaran 2 (dua) Terwujudnya Akuntabilitas Instansi Kecamatan, untuk Tahun 2023 nilai SAKIP Kecamatan Pengaron mendapatkan nilai 71,76 dengan predikat BB.

B. SARAN-SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan wawasan dan pendampingan yang rutin terhadap aparatur di Kecamatan khususnya dalam penyusunan Laporan SAKIP dan laporan lainnya untuk memperoleh Laporan yang baik dan akuntabel.
2. Adanya pembahasan di tingkat yang lebih tinggi tentang program dan kegiatan yang selama ini dilaksanakan di Kecamatan agar sinkron antara perencanaan dan keuangan agar adanya kejelasan dalam capaian kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pengaron Banjar Tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pengaron Tahun 2023
2. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Kecamatan Pengaron Tahun 2023
3. Rekap Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023